

**PROFESIONALITAS SEBAGAI ASAS  
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)  
Bidang Ilmu Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Hari Selasa, Tanggal 26, Bulan Juli, Tahun 2022

Pukul 09.00, Di Ruang Sidang Doktor

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**CHOLIDAH UTAMA**

**NIM. 02013681621004**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JULI 2022**

**PROFESIONALITAS SEBAGAI ASAS  
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)  
Bidang Ilmu Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Hari Selasa, Tanggal 26, Bulan Juli, Tahun 2022

Pukul 09.00, Di Ruang Sidang Doktor

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**CHOLIDAH UTAMA**

**NIM. 02013681621004**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JULI 2022**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Cholidah Utama**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 2 Februari 1981  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
NIM : 02013681621004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi negeri lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan disertasi ini.

Palembang, 26 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Cholidah Utama  
NIM.02013681621004

## ABSTRAK

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, mengatur tentang kriteria pengukuran indeks profesionalitas PNS, kriteria tersebut diarahkan agar PNS berorientasi kepada pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Kriteria tingkat profesionalitas PNS tersebut meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Empat kriteria tersebut belum cukup, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat profesionalitas PNS, yang akan berdampak kepada pelayanan publik, belum cukupnya kriteria pengukuran tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*). Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pelayanan publik tahun 2019, unsur kompetensi pelaksana pelayanan mengalami penurunan dibandingkan ditahun 2018 yaitu unsur kompetensi pelaksana pelayanan. Tahun 2018 nilai survey unsur kompetensi pelaksana pelayanan adalah 81.38, sedangkan tahun 2019 nilai survey unsur kompetensi pelaksana pelayanan adalah 80.97, terjadi penurunan sebanyak 0.41. Fokus penelitian ini yaitu berkaitan dengan kompetensi pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Adapun permasalahan dalam disertasi ini adalah : 1) Apa hakikat profesionalitas sebagai asas? 2) Apa kriteria pengukuran dipenuhi agar PNS profesional? 3) Bagaimana pengaturan pelayanan publik yang profesional oleh PNS pada masa yg akan datang ? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, Pendekatan penelitian dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, filsafat hukum, kasus, dan futuristik. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif menekankan tehnik *deduktif*.

1). Hakikat profesionalitas sebagai adalah sebagai wujud pelayanan publik, yang terkait erat dengan tugas dan fungsi PNS sebagai aparatur pemerintah, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya maka diarahkan PNS memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. 2). Kriteria pengukuran yang dipenuhi agar PNS profesional yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin, dan motivasi kerja. Motivasi kerja sebagai kriteria pelengkap untuk menentukan tingkat profesionalitas yang diinginkan dari PNS. Berdasarkan lima kriteria pengukuran inilah maka dapat dikatakan PNS bisa menunjukkan profesionalnya. 3). Pengaturan pelayanan publik yang profesional oleh PNS pada masa yg akan datang meliputi kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin, dan motivasi kerja. Motivasi kerja sebagai tambahan pelengkap agar PNS bisa menunjukkan profesionalnya. Penulis memberikan gagasan melalui teori kepastian hukum terkait dengan kriteria pengukuran tingkat profesional PNS, menambahkan konsep baru yaitu motivasi kerja pada Pasal 4 huruf e di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018. DPR selaku pihak legislator yang punya fungsi mengubah sebagian untuk menyempurnakan peraturan undang-undang, yang berdasarkan pada profesionalitas agar PNS berkualitas dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana pelayanan publik.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Pelayanan Publik, Penempatan, Profesio

## **ABSTRACT**

*Article 1 Number 6 Regulation of the Minister of Administrative Reform Bureaucratic Reform Number 38 of 2018, regulates the criteria for measuring the professionalism index of civil servants, these criteria are directed so that civil servants are oriented to professional and quality public service. The criteria for the level of professionalism of civil servants include qualifications, competence, performance, and discipline. The four criteria are not enough, causing the low level of professionalism of civil servants, which will have an impact on public services, the lack of measurement criteria causes a vacuum of norms. Based on the results of the 2019 public service satisfaction survey, the element of service implementer competence has decreased compared to 2018, namely the element of service implementer competence. In 2018 the survey value for the service implementer competency element was 81.38, while in 2019 the survey value for the service implementer competency element was 80.97, a decrease of 0.41. The focus of this research is related to the competence of implementers in providing public services. The problems in this dissertation are: 1) What is the nature of professionalism as a principle? 2) What measurement criteria are met in order for civil servants to be professional? 3) How will professional public service arrangements be made by civil servants in the future? This research is a type of normative legal research, the research approach is to approach legislation, comparison, legal philosophy, cases, and futuristic. Conclusions in normative legal research emphasize deductive techniques.*

*1). The nature of professionalism as a form of public service, which is closely related to the duties and functions of civil servants as government officials, in order to carry out their duties and functions, civil servants are directed to provide professional and quality services. 2). The measurement criteria that are met so that civil servants are professional are qualifications, competence, performance, discipline, and work motivation. Work motivation as a complementary criterion to determine the desired level of professionalism of civil servants. Based on these five measurement criteria, it can be said that civil servants can show their professionalism. 3). Professional public service arrangements by civil servants in the future include qualification criteria, competence, performance, discipline, and work motivation. Work motivation as a complementary addition so that civil servants can show their professionalism. The author provides ideas through the theory of legal certainty related to the criteria for measuring the professional level of civil servants, adding a new concept, namely work motivation in Article 4 letter e in the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 38 of 2018. The DPR as the legislator has the function of partially changing to perfect the regulations. the law, which is based on professionalism so that civil servants are qualified in carrying out their duties as implementers of public services.*

*Keywords: Civil Servants, Public Service, Placement, Professionalism*

